

Strategi Pengembangan BUMK Melalui Pendekatan Asset-Based Community Development di Desa Sri Kencono, Lampung Tengah

Yulianto^{1*}, Teuku Fahmi^{2*}, Dewi Ayu Hidayati^{3*}, Astiwi Inayah^{4*}

^{1*}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

^{2*}Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

^{3*}Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

^{4*}Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}yulianto@fisip.unila.ac.id, ^{2*}teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id, ^{3*}dewiayu.hidayati@fisip.unila.ac.id, ^{4*}astiwi.inayah@fisip.unila.ac.id

Abstract

Abstract Village-Owned Enterprises (BUMDes/BUMK) often struggle with operational mismatches that hinder rural economic development despite rich local resources. This study aims to evaluate the performance of BUMK Kencana Maju Makmur in Sri Kencono Village, Central Lampung, map community assets and needs, and formulate strategic reorientations for sustainable economic development. Using a qualitative case study design grounded in the Asset-Based Community Development (ABCD) framework, data were collected through focus group discussions, in-depth interviews, document analysis, and SWOT mapping. The results reveal that Sri Kencono possesses strong social capital and abundant agricultural assets, particularly cassava, rice, and livestock. However, BUMK suffers from an operational mismatch, allocating capital to low-impact services like photocopying rather than high-potential agricultural sectors due to managerial risk aversion and limited capacity. Consequently, the local community remains vulnerable to non-formal high-interest loans and post-harvest technological constraints. To overcome these barriers, the study proposes a strategic reorientation based on village potential mapping, including modernizing post-harvest processing, managing agricultural machinery rentals, and adopting a circular economy approach by processing tapioca solid waste (onggok) into fermented animal feed. The practical implication emphasizes the necessity of structured managerial capacity building from local authorities and aligning BUMK capital allocation with local agrifood value chains to foster rural economic self-reliance.

Keywords: Asset-Based Community Development; Circular Economy; Rural Development; Village-Owned Enterprises; Village Potential Mapping.

Abstrak

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sering kali mengalami ketidaksesuaian operasional (*mismatch*) yang menghambat pertumbuhan ekonomi perdesaan meskipun didukung oleh sumber daya lokal yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMK Kencana Maju Makmur di Kampung Sri Kencono, Kabupaten Lampung Tengah, memetakan aset dan kebutuhan masyarakat, serta merumuskan strategi reorientasi usaha yang berkelanjutan. Menggunakan desain studi kasus kualitatif berlandaskan kerangka *Asset-Based Community Development (ABCD)*, data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta pemetaan *SWOT*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Sri Kencono memiliki modal sosial yang kuat dan aset agraris yang melimpah, khususnya komoditas ubi kayu, padi, dan peternakan. Kendati demikian, BUMK mengalami *mismatch* operasional dengan mengalokasikan modal usaha pada sektor jasa percetakan minim risiko daripada sektor pertanian berpotensi tinggi akibat keterbatasan kapasitas manajerial pengelola. Dampaknya, masyarakat masih rentan terhadap jeratan lembaga keuangan non-formal dan keterbatasan teknologi pascapanen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi reorientasi berbasis pemetaan potensi desa, meliputi modernisasi alat pengolahan pangan, penyediaan sewa alat mesin pertanian, serta penerapan ekonomi sirkular melalui pengolahan limbah *onggok* menjadi pakan ternak terfermentasi. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan manajerial terstruktur dari pemerintah daerah serta penyalarsan alokasi modal BUMK dengan rantai nilai agribisnis lokal guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Kata Kunci: *Asset-Based Community Development*; Badan Usaha Milik Kampung; Ekonomi Sirkular; Pembangunan Perdesaan; Pemetaan Potensi Desa.

Info Artikel

Diterima 2 September 2026

Direvisi 11 September 2026

Diterima 21 September 2026

Tersedia Online 28 September 2026

yulianto@fisip.unila.ac.id

Copyright©2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

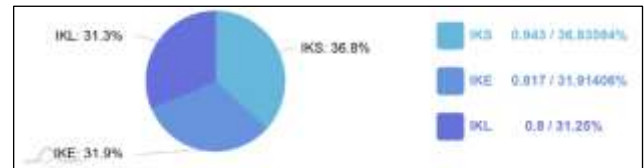
I. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat global mengalami pergeseran fundamental. Pendekatan tradisional lebih berorientasi pada kebutuhan (*needs-based approach*) yang pada akhirnya memposisikan masyarakat sekadar sebagai penerima bantuan pasif, untuk konteks kekinian, pendekatan tersebut mulai ditinggalkan. Sebagai kelanjutannya, pendekatan berbasis aset (*Asset-Based Community Development/ABCD*) hadir dengan mengedepankan penggalian potensi internal, kemandirian lokal, serta penguatan kapasitas komunitas dari dalam ke luar (Haines, 2014; Lloyd, 2021; Nel, 2020). Pendekatan berorientasi kebutuhan terbukti sering kali memicu ketergantungan dan mematikan inisiatif lokal karena berfokus pada defisit wilayah. Sebaliknya, pendekatan *ABCD* mengidentifikasi keterampilan individu, jejaring sosial, serta sumber daya fisik dan budaya sebagai fondasi utama untuk membangun ketahanan komunitas yang berkelanjutan (Harrison *et al.*, 2019; Nel, 2024, 2025).

Di tengah dinamika tersebut, integrasi pemanfaatan aset lokal dengan agenda pembangunan berkelanjutan menjadi krusial untuk mencakup target *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 di tingkat perdesaan (Liu *et al.*, 2024). Pembangunan kawasan desa tidak lagi dipandang terbatas pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi menuntut pengelolaan efisiensi sumber daya melalui prinsip ekonomi sirkular (Adamov *et al.*, 2025), penilaian potensi wilayah secara terpadu (Evtushkova & Lesnichaya, 2021; Kostyukov *et al.*, 2021), serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan lingkungan (Appau *et al.*, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemetaan potensi desa dan pemanfaatan *ABCD* untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian oleh Farisa *et al.* (2019) menyoroti pentingnya alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, sementara Andayani *et al.* (2022) menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor (*penta-helix*) dalam program sosial desa. Selain itu, studi dari Liu *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan desa tidak hanya diukur dari kenaikan angka produksi semata, melainkan dari perbaikan kualitas hidup dan penguatan partisipasi publik. Namun demikian, terlihat bahwa sebagian besar studi *ABCD* berfokus pada desa-desa tertinggal atau pemecahan masalah sosial spesifik seperti stunting dan kemiskinan, namun masih sangat jarang diintegrasikan secara langsung dengan strategi pengembangan BUMDes pada desa yang sudah berstatus "Mandiri".

Untuk itu, penelitian ini memberikan penekanan pada pengintegrasian kerangka *ABCD* dengan mengidentifikasi potensi desa dengan memetakan aset internal di Desa Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Capaian skor IDM 2024 Desa Sri Kencono mencapai 0,8532 (Status Mandiri) dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) mencapai 0,943. Namun di sisi lain, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) masih berada pada angka 0,817 dan unit usaha BUMDes setempat memerlukan reorientasi strategi agar mampu bersaing.



Gambar 1. Indeks Komposit (IKL, IKE, dan IKS) IDM Desa Sri Kencono, Bumi Nabung, Lampung Tengah
Sumber: (idm.kemendes.go.id/rekomendasi, 2024)

Mengacu pada landasan teori modal sosial (Ward, 2023) dan teori pembangunan berbasis aset (Nel, 2025), fokus dan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan potensi dan aset lokal (sosial, manusia, alam, fisik, finansial, dan kelembagaan) di Desa Sri Kencono dengan menggunakan pendekatan *ABCD*, serta merumuskan implikasi strategis pemetaan tersebut dalam mendukung pembentukan unit usaha BUMDes berbasis potensi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*

Pembangunan masyarakat secara konvensional kerap didominasi oleh pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*). Pendekatan ini berfokus pada analisis masalah, defisit wilayah, dan ketidakmampuan komunitas, yang pada akhirnya menempatkan warga hanya sebagai penerima bantuan pasif serta menciptakan ketergantungan struktural (Haines, 2014; Lloyd, 2021). Sebagai koreksi atas paradigma tersebut, pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* bertransformasi dan memfokuskan pada modal dan potensi internal yang telah dimiliki masyarakat (Nel, 2020).

Prinsip utama *ABCD* menekankan pemanfaatan potensi internal, penguatan kapasitas komunitas, dan pembangunan dari dalam ke luar (*building from the inside out*). Melalui pendekatan ini, kemandirian lokal



dibangun dengan mengidentifikasi serta mengonsolidasikan aset yang ada untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan luar (Harrison *et al.*, 2019; Nel, 2024, 2025).

Dalam operasionalisasinya, *ABCD* mengklasifikasikan aset perdesaan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu aset manusia, sosial, alam, fisik, finansial, dan kelembagaan. Mobilisasi aset tersebut memerlukan adanya narasi interaktif di tingkat akar rumput dan penyediaan lingkungan yang mendukung (*enabling environments*) agar warga memiliki ruang untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri (Harrison *et al.*, 2019).

2.2 Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan dan SDGs Desa

Pembangunan perdesaan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Keberhasilan pembangunan kawasan desa tidak lagi diukur secara tunggal melalui kenaikan output ekonomi atau volume produksi semata, melainkan melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Liu *et al.*, 2024).

Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*) menjadi salah satu instrumen utama untuk mengoptimalkan potensi lokal secara efisien, meminimalkan limbah, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang ramah lingkungan (Adamov *et al.*, 2025). Penilaian potensi sumber daya wilayah secara terpadu mutlak diperlukan agar perancangan strategi keberlanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan karakteristik lokal desa (Evtushkova & Lesnichaya, 2021; Kostyukov *et al.*, 2021).

Pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* di tingkat desa sering kali dihadapkan pada ketimpangan antardimensi pembangunan. Dalam pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), ketidakseimbangan antara Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) menjadi tantangan nyata bagi desa berstatus "Mandiri".

Studi oleh Liu *et al.* (2024) menunjukkan pentingnya mengidentifikasi dinamika *trade-off* dan optimasi antar-indikator keberlanjutan. Sebuah desa dapat mencapai skor ketahanan sosial yang sangat tinggi melalui modal sosial warga, namun tetap memiliki kerentanan jika ketahanan ekonominya belum terbangun secara berdaya saing (Chen *et al.*, 2024; Liu *et al.*, 2024).

2.3 Tata Kelola Desa Mandiri, Kolaborasi Multi-Sektor, dan Strategi BUMDes

Penguatan partisipasi publik dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan merupakan syarat mutlak dalam tata kelola pembangunan perdesaan (Farisa *et al.*, 2019; Liu *et al.*, 2024). Pengalaman pemanfaatan dana desa menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat (Farisa *et al.*, 2019).

Lebih lanjut, pendayagunaan model kolaborasi multi-sektor (*penta-helix*), yang melibatkan pemerintah desa, akademisi, sektor bisnis, komunitas lokal, dan media, terbukti mampu mengakselerasi penanganan berbagai persoalan sosial-ekonomi serta meningkatkan efektivitas program desa (Andayani *et al.*, 2022).

Dalam kaitannya tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai pilar utama pemulihan dan penguatan ekonomi desa. Bagi desa yang telah mencapai status "Desa Mandiri", keberadaan BUMDes tidak lagi sekadar formalitas kelembagaan, melainkan harus diarahkan menjadi entitas bisnis yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan (Chen *et al.*, 2024).

Reorientasi strategi BUMDes memerlukan pergeseran dari unit usaha konvensional menuju pengelolaan usaha yang berakar pada hasil pemetaan 6 aset lokal (*ABCD*). Kebijakan pemerintah dan komitmen pemangku kepentingan bertindak sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat efektivitas pemanfaatan aset lokal menjadi unit usaha ekonomis (Chen *et al.*, 2024). Dengan mendasarkan strategi bisnis BUMDes pada kepemilikan aset internal, ketimpangan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dapat diatasi tanpa merusak tatanan sosial yang telah terbangun.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pemetaan potensi lokal dan perumusan strategi bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria status Desa Mandiri dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 sebesar 0,8532, yang menunjukkan ketimpangan antara Indeks Ketahanan Sosial (IKS) bernilai tinggi (0,943) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang masih relatif rendah (0,817). Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang



mewakili pemangku kepentingan, mencakup aparat pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pendamping desa.

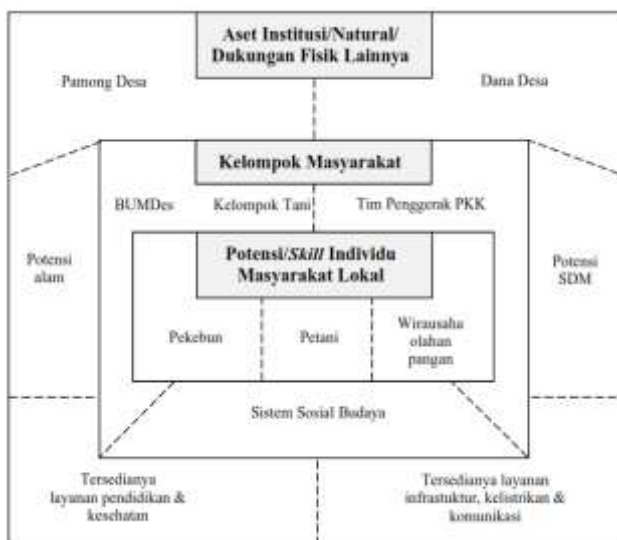
Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumen profil desa, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian matriks aset dan analisis *SWOT*. Hasil analisis dievaluasi secara kritis guna memastikan rumusan reorientasi strategi BUMDes didukung oleh partisipasi publik dan kebijakan pemerintah. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* bersama pemangku kepentingan desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Pemetaan Aset dan Potensi Ekonomi Kampung Sri Kencono

Berdasarkan hasil pemetaan aset (*Community Assets Map*) yang ditunjukkan pada Gambar 2, Kampung Sri Kencono memiliki fondasi modal sosial dan sumber daya alam yang terstruktur secara berjenjang. Pada lapisan terluar, dukungan institusional seperti Pamong Desa, APBK (Dana Desa), ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana infrastruktur dasar (jalan, listrik, dan komunikasi) menjadi pilar penyokong aktivitas sosial-ekonomi warga.



Gambar 2. Peta Aset Masyarakat (*Community Assets Map*) di Kampung Sri Kencono
Sumber: (Olahan Peneliti, 2026)

Di tingkat komunitas, keterlibatan aktif kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani, Tim

Penggerak PKK, dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menjadi wadah artikulasi potensi individu. Pengelompokan ini menopang keahlian lokal masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pekebun, serta wirausaha olahan pangan lokal. Potensi ini mempertegas posisi Kampung Sri Kencono sebagai salah satu wilayah dengan kesiapan kelembagaan terbaik di tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Sekretaris Camat Bumi Nabung, Abdul Rohmat:

"Dari 7 kampung yang ada di Bumi Nabung, dapat dikatakan BUMK di Desa Sri Kencono yang memiliki prospek lebih baik di antara yang lainnya, meski unit usaha yang ada juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Setidaknya secara organisasi, BUMK Kencana Maju Makmur lebih menjanjikan apabila diberikan pelatihan dan pendampingan intensif mengenai pengelolaan manajerial BUMDes. Terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam utamanya potensi di bidang pertanian dan peternakan, harapannya potensi yang ada di Desa Sri Kencono bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan unit usaha di BUMK tersebut." (wawancara pada 28/8/2026)

Analisis *SWOT* pada Tabel 1 memperkuat gambaran potensi tersebut. Ketersediaan komoditas ubi kayu (singkong), padi, dan hortikultura, didukung sektor peternakan sapi dan kambing yang prospektif, menjadi kekuatan utama (*Strengths*) kampung. Keterampilan warga dalam mengolah bahan mentah menjadi produk pangan lokal (tiwul, keripik, dan kue) memberikan peluang (*Opportunities*) diversifikasi usaha berbasis ekonomi sirkular dan pengembangan BUMK sebagai *hub* distribusi komoditas.

Tabel 1. Pengelompokan Identifikasi *SWOT* Kampung Sri Kencono

<u>Strengths (Kekuatan)</u>	<u>Opportunities (Peluang)</u>
• Potensi SDA dan komoditas pertanian unggulan: tanah subur, potensi lahan luas, serta melimpahnya hasil komoditas ubi kayu/singkong, padi, dan hortikultura. • Sektor peternakan prospektif: ketersebaran ternak sapi, kambing, dan ayam dengan ketersediaan pakan lokal yang melimpah. • Keterampilan olahan pangan lokal: kapasitas petani/warga dalam mengolah bahan mentah menjadi produk olahan siap jual (tiwul, keripik, kue). • Infrastruktur dasar memadai: ketersediaan akses jalan, kelistrikan, dan sarana komunikasi.	• Diversifikasi tanaman pangan: peluang rotasi tanam ubi kayu, jagung, dan padi yang fleksibel mengikuti musim. • Penguatan BUMDes sebagai hub distribusi: peluang BUMDes menjadi wadah penampung dan pendistribusi komoditas hasil tani ke pasar yang lebih luas. • Pengembangan usaha peternakan terpadu: potensi pembentukan area penggemukan sapi/kambing. • Penerapan ekonomi sirkular limbah industri: prospek pemanfaatan limbah pabrik sekitar desa (onggok, biogas,



• Kelembagaan dan modal sosial: struktur organisasi BUMDes yang sudah terbentuk, suasana lingkungan aman-kondusif, serta tingginya dukungan moril masyarakat.	sampah organik) menjadi produk bernilai tambah. • Pengembangan potensi wisata dan budaya: integrasi wisata alam, budaya, dan keberagaman potensi lokal.
Weaknesses (Kelemahan) • Keterbatasan teknologi dan sarana pengolahan: alat pembuat tiwul masih manual, ketiadaan mesin pengolah/fermentasi pakan, serta minimnya modernisasi alat pertanian (traktor, mesin perontok padi/blower). • Keterbatasan infrastruktur air: belum tersedianya tempat penyimpanan air permanen. • Kapasitas SDM dan manajerial BUMDes: minimnya kemampuan manajerial tata kelola BUMDes, terbatasnya pengalaman, serta rendahnya pemahaman strategi pemasaran. • Kendala permodalan dan pasokan input: kekurangan modal usaha, ketidakstabilan harga jual saat panen raya, serta kelangkaan pupuk.	Threats (Ancaman) • Risiko iklim dan kekeringan: musim kemarau panjang yang mengeringkan pengairan sungai, memicu kelangkaan air, menghambat pertumbuhan singkong, serta menurunkan pasokan pakan. • Fluktuasi dan ketidakpastian harga pasar: kerentanan harga jual komoditas pertanian dan ternak yang tidak stabil. • Maraknya jeratan keuangan non-formal: ancaman pinjaman online berbiaya tinggi dan praktik rentenir di tingkat warga. • Dampak negatif limbah industri: polusi bau menyengat serta risiko pencemaran air limbah pabrik yang berpotensi mematikan tanaman padi.

Sumber: (Olahan peneliti, 2026)

4.1.2 Identifikasi Masalah dan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat

Meskipun memiliki aset yang potensial, pemetaan kebutuhan (*Community Needs Map*) pada Gambar 3 menunjukkan adanya persoalan struktural yang dihadapi masyarakat lokal, mulai dari tingkat personal, sosial, hingga institusional.



Gambar 3. Peta Kebutuhan Masyarakat (*Community Needs Map*) di Kampung Sri Kencono
Sumber: (Olahan Peneliti, 2026)

Pada tingkat personal dan komunal, tantangan utama berpusat pada keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta ketidakpastian harga komoditas saat panen raya. Pada tingkat sosial, rentannya masyarakat terhadap jeratan keuangan non-formal (rentenir dan pinjaman *online*) serta ancaman dampak lingkungan dari limbah pabrik sekitar menjadi masalah mendesak. Dari aspek institusional, kelemahan manajerial BUMK dan terbatasnya jejaring kelembagaan menjadi kendala utama pencapaian kesejahteraan secara merata.

Kondisi riil di lapangan mengenai keterbatasan sarana produksi dan pengolahan ini dipertegas oleh penjelasan Bendahara BUMK Kencana Maju Makmur, Mashuri:

"...Usaha rumahan... belum pernah mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif... Untuk sektor pertanian ada ubi kayu dan masyarakat lokal desa cenderung memanfaatkannya untuk pembuatan nasi tiwul. Sepengamatan tim BUMK juga terlihat ada keterbatasan alat pembuatan tiwul itu sendiri, sebagian besar dilakukan secara manual atau ditumbuk, hanya sedikit yang sudah menggunakan mesin. Kendala yang dihadapi oleh petani saat musim panen, utamanya padi, di desa ini belum ada mesin pemanen padi (combine) pada akhirnya, setiap kali panen kadangan desa kami mendatangkan mesin dari luar yang harus berebutan sewanya." (wawancara pada 9/9/2026)

4.1.3 Evaluasi Kinerja Kelembagaan dan Mismatch Operasional BUMK

Berdasarkan penelusuran dokumen legalitas dan perencanaan BUMK Kencana Maju Makmur tahun 2023, BUMK ini secara resmi didirikan melalui Peraturan Kampung Sri Kencono Nomor 140/KPTS/18.02.24.01/TAHUN 2023. Modal awal yang dialokasikan melalui penyertaan modal APB Kampung adalah sebesar Rp 50.000.000.

Dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 3, arah pengembangan BUMK diprioritaskan pada sektor pertanian (pengolahan umbi palawija/ubi kayu), peternakan (pembibitan dan penggemukan kambing potong), serta jasa pelayanan (E-Samdes dan L-Smart). Namun, hasil analisis dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) operasional menunjukkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara mandat perencanaan strategis dengan alokasi realisasi usaha.

Unit usaha yang justru dieksekusi awal oleh pengelola BUMK adalah unit usaha pelayanan jasa *photocopy* (dengan investasi sebesar Rp 50.000.000)



serta perencanaan unit wahana taman bermain/edukasi anak (dengan usulan investasi Rp 30.000.000).

Orientasi bisnis yang berfokus pada sektor jasa non-agraris ini menyebabkan BUMK Kencana Maju Makmur belum mampu menyentuh dan menyelesaikan masalah inti perekonomian Kampung Sri Kencono. Kegagalan BUMK dalam menghadirkan unit usaha unggulan berbasis sumber daya lokal juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial pengelola. Sebagaimana ditambahkan oleh Mashuri:

“...Sebenarnya dari BUMK Kencana Maju Makmur ada program penawaran modal penyerta. Hanya saja kami dari pengelola BUMK belum pernah juga mendapatkan pelatihan secara detail dan rinci bagaimana menjalankan unit usaha peminjaman modal tersebut.” (wawancara pada 9/9/2026)

Ketidakmampuan pengurus dalam mengelola program pinjaman atau modal penyerta ini memperbesar celah masuknya lembaga keuangan non-formal dan rentenir yang merugikan warga lokal. Kondisi ini menjadi refleksi kritis bahwa keberadaan dokumen hukum dan penyertaan modal awal belum cukup untuk menjamin efektivitas BUMK jika tidak diimbangi dengan *capacity building* pengelola serta pemetaan unit usaha yang presisi berbasis kearifan lokal.

4.1.4 Strategi Optimalisasi BUMK Berbasis Potensi Agraris dan Ekonomi Sirkular

Guna mengatasi kesenjangan antara potensi desa dan realisasi BUMK, diperlukan formulasi strategi reorientasi kegiatan usaha BUMK Kencana Maju Makmur. Mengacu pada integrasi temuan FGD, *SWOT*, dan analisis kewilayahan, perbaikan BUMK dapat difokuskan pada tiga aspek utama:

- 1) Modernisasi rantai pasok pascapanen
BUMK perlu mengalihkan fokus investasi pada pengadaan teknologi pengolahan pangan dan alsintan. Pengadaan mesin pembuat tiwul modern bagi kelompok usaha wanita/PKK serta penyediaan unit sewa *combine harvester* untuk panen padi dapat menjadi bisnis inti (*core business*) BUMK. Langkah ini langsung menjawab kebutuhan mendesak petani, memotong ketergantungan sewa mesin dari luar desa, sekaligus menciptakan unit usaha unggulan yang bernilai tambah tinggi.
- 2) Penguatan tata kelola manajerial dan program modal penyerta terstruktur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama pihak Kecamatan Bumi Nabung perlu memberikan pendampingan dan pelatihan manajerial secara intensif. Khusus untuk unit modal penyerta,

pengelola BUMK harus dibekali analisis risiko kredit dan prosedur operasi standar (SOP) pencairan agar alokasi modal penyerta BUMK dapat disalurkan secara aman kepada pelaku UMKM olahan pangan, sekaligus membebaskan warga dari ancaman jeratan pinjaman *online* ilegal dan rentenir.

3) Pemanfaatan Ekonomi Sirkular dan Integrasi Limbah Industri

Melalui pemanfaatan potensi *onggok* (limbah padat ubi kayu) dari industri sekitar, BUMK dapat mengambil peran sebagai pengelola pengolahan pakan ternak fermentasi atau pakan konsentrat. Pakan ini disalurkan untuk mendukung unit usaha peternakan terpadu (sapi dan kambing) di Kampung Sri Kencono. Langkah ini tidak hanya berpotensi menekan biaya produksi peternak lokal, melainkan juga menekan dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

4.2 Pembahasan

Temuan empiris di Kampung Sri Kencono menunjukkan dinamika yang relevan jika dikaji lebih lanjut dengan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* serta konsep tata kelola kelembagaan ekonomi desa. Pendekatan *ABCD* menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memobilisasi aset internal komunitas (*inside-out*) ketimbang sekadar bertumpu pada pendekatan berbasis kebutuhan atau pemecahan masalah semata (*needs-based approach*) (Haines, 2014; Lloyd, 2021; Nel, 2020). Keberadaan modal sosial dan kelembagaan yang kuat di Kampung Sri Kencono, seperti aktifnya Kelompok Tani, Tim Penggerak PKK, dan ketersediaan lahan agraris, mengonfirmasi bahwa komunitas perdesaan memiliki aset endogen yang potensial untuk digerakkan (Chen *et al.*, 2024; South *et al.*, 2024). Sejalan dengan temuan Riska Farisa *et al.* (2019) serta Rahayu *et al.* (2024), modal sosial dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan pengembangan lembaga ekonomi desa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aset-aset tersebut belum terkonversi secara optimal menjadi kesejahteraan komunal akibat belum berjalannya fungsi fasilitasi kelembagaan secara efektif (Ward, 2023).

Kesenjangan (*mismatch*) antara mandat Anggaran Dasar BUMK Kencana Maju Makmur dan realisasi unit usahanya mencerminkan juga adanya hambatan tata kelola dan pola alokasi modal yang belum presisi. Fenomena ini sejalan dengan kajian Trinanda dan Khoirunurrofik (2024) serta Lesmana *et al.* (2025) yang menyoroti bahwa efektivitas BUMDes dalam pembangunan desa kerap terhalang oleh



keterbatasan kapasitas manajerial pengelola dan ketidaktepatan pemilihan fokus bisnis. Pengalihan fokus ke unit usaha minim risiko tetapi berdampak ekonomi rendah menunjukkan belum terinternalisasinya nilai-nilai kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam tubuh pengelola BUMK (Imanuella *et al.*, 2025; Muryanti, 2020; Widiastuti *et al.*, 2025). Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Satoto *et al.* (2024) dan Febrina *et al.* (2024), revitalisasi BUMDes memerlukan reorientasi strategi yang menyelaraskan antara kebijakan penyertaan modal, penguatan kapasitas SDM, serta perlindungan lingkungan hidup guna mengatasi berbagai hambatan operasional di tingkat lokal (Apostolopoulos *et al.*, 2020; Chapman *et al.*, 2025).

Lebih jauh, usulan strategi reorientasi BUMK berbasis pemetaan potensi desa, seperti modernisasi olahan tiwul, penyediaan sewa alat pertanian, dan pengolahan limbah *onggok*, memperkuat pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas lokal (Abidin, 2023; Hardika & Putra, 2020; Masrur *et al.*, 2019; Yulianto *et al.*, 2021). Komoditas ubi kayu, padi, dan peternakan ruminansia di Kecamatan Bumi Nabung merupakan potensi strategis wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang membutuhkan sentuhan inovasi dan integrasi rantai nilai (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2025; Habsari & Irwani, 2021; Syafitri *et al.*, 2021). Pemanfaatan limbah padat ubi kayu (*onggok*) menjadi pakan ternak terfermentasi tidak hanya menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan, tetapi juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan komunitas perdesaan secara berkelanjutan (Adamov *et al.*, 2025; Liu *et al.*, 2024). Dengan demikian, penyelarasan antara aset lokal, penguatan kapasitas kelembagaan BUMK, dan penerapan ekonomi sirkular berbasis pemetaan potensi desa menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kampung Sri Kencono.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Sri Kencono memiliki fondasi modal sosial dan potensi sumber daya alam yang melimpah pada sektor agraris, khususnya ubi kayu, padi, dan peternakan, namun ketersediaan aset tersebut belum terkonversi secara optimal menjadi kesejahteraan komunal. BUMK Kencana Maju Makmur mengalami *mismatch* operasional akibat pengalihan alokasi modal ke unit usaha jasa non-agraris yang dipersepsikan berisiko rendah, sehingga belum mampu menyentuh akar masalah perekonomian warga. Keterbatasan kapasitas manajerial pengelola serta minimnya pemahaman tata

kelola keuangan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas BUMK sebagai *hub* rantai pasok ekonomi desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, saran yang direkomendasikan mencakup reorientasi strategi bisnis BUMK berbasis Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) melalui modernisasi teknologi pengolahan pascapanen, penyediaan sewa alsintan, serta pemanfaatan limbah industri (*onggok*) menjadi pakan ternak terfermentasi berbasis ekonomi sirkular. Langkah reorientasi ini perlu diimbangi dengan pendampingan manajerial dan pelatihan tata kelola terstruktur dari Pemerintah Kecamatan Bumi Nabung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) guna memitigasi risiko keuangan non-formal sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi kampung secara berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Peningkatan nilai tambah produk unggulan dalam upaya menggerakkan ekonomi perdesaan. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 433-439. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i3.3605>
- Adamov, T., Iancu, T., Ciolac, R., & Salasan, C. (2025). Does the circular economy represent an opportunity for the sustainable development of rural communities? Paper presented at the *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management*, SGEM.
- Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., Fauziah, N., & Praharsena, B. (2022). Penta-helix “Desa Emas” as a commitment to accelerate stunting reduction in Sumenep Regency, East Java Province. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 64-75. doi:10.20473/mgi.v17i1SP.64-75
- Apostolopoulos, N., Liargovas, P., Stavroyiannis, S., Makris, I., Apostolopoulos, S., Petropoulos, D., & Anastasopoulou, E. E. (2020). Sustaining rural areas, rural tourism enterprises and EU development policies: A multi-layer conceptualisation of the obstacles in Greece. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187687>
- Appau, P. K., Asibey, M. O., & Grant, R. (2024). Enabling asset-based community development solutions: Pro-poor urban climate resilience in Kumasi, Ghana. *Cities*, 145. doi:10.1016/j.cities.2023.104723



- BPS Kabupaten Lampung Tengah. (2025). *Kecamatan Bumi Nabung dalam angka 2025*. Terbanggi Besar: BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- Chapman, A., Buccheri, A., Mohotti, D., Shee, W. A., Huggins, C., Alston, L., Hutchinson, A. M., Yoong, S., Beks, H., Namara, K. M. P., Peeters, A., & Ugalde, A. (2025). Staff-reported barriers and facilitators to the implementation of healthcare interventions within regional and rural areas: a rapid review. *BMC Health Services Research*, 25. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12480-8>
- Chen, H., Xu, Y., Agba Tackie, E., & Ahakwa, I. (2024). Assessing the impact of asset-based community development approach on rural poverty alleviation in Ghana: The moderating role of government policies. *SAGE Open*, 14(1). doi:10.1177/21582440231226020
- Evtushkova, E., & Lesnichaya, E. (2021). Comprehensive approach to assessing resource potential of rural territories (on the materials of the ishim district of the Tyumen region). Paper presented at the *BIO Web of Conferences*.
- Febrina, R., Marta, A., Amin, R. M., & Hadi, S. (2024). Economic development and the rural environment: BUMDES development strategy. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 02005). *EDP Sciences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450602005>
- Habsari, I. K., & Irwani, N. (2021). Analisis potensi wilayah untuk pengembangan ternak ruminansia di Kabupaten Lampung Tengah. *PETERPAN (Jurnal Peternakan Terapan)*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.25181/peterpan.v3i1.2211>
- Haines, A. (2014). Asset-based community development. In *An Introduction to Community Development: Second Edition* (pp. 45-56).
- Hardika, A. L., & Putra, I. G. S. (2020). Optimalisasi manajemen strategi BUMDes untuk mewujudkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Desa Langonsari. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 257-270.
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: Narratives, practice, and conditions of possibility—A qualitative study with community practitioners. *SAGE Open*, 9(1). doi:10.1177/2158244018823081
- Imanuella, S. F., Idris, A., & Kamaruddin, N. (2025). Social entrepreneurship and rural development in post-independence Indonesia. *Social Enterprise Journal*, 21(1), 46-66. <https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2023-0155>
- Kostyukov, A. V., Pritula, O. D., & Davydova, S. G. (2021). Regional aspects of integrated development of rural areas. Paper presented at *the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Lesmana, B., Gunawan, I., & Sari, R. (2025). Success Factors of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Indonesia. *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(2), 359-379. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.319>
- Liu, D., Li, F., Qiu, M., Zhang, Y., Zhao, X., & He, J. (2024). An integrated framework for measuring sustainable rural development towards the SDGs. *Land Use Policy*, 147. doi:10.1016/j.landusepol.2024.107339
- Lloyd, N. (2021). Building communities from the inside out. In *Modern Police Leadership: Operational Effectiveness at Every Level* (pp. 423-433).
- Masrur, A. R., Mabburroh, H., & Darwis. (2019). PRUKADES (Featured Product of Rural Area) in increasing home industry productivity in Pamekasan. *Economics and Accounting Journal*, 2(3), 160-167. <https://doi.org/10.32493/eaj.v2i3.y2019>
- Muryanti, M. (2020). Towards social entrepreneurship in the village through Village-Owned Enterprises. *Society*, 8(1), 163-174. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161>
- Nel, H. (2020). Stakeholder engagement: Asset-based community-led development (ABCD) versus the traditional needs-based approach to community development. *Social Work (South Africa)*, 56(3), 362-378. doi:10.15270/56-4-857
- Nel, H. (2024). Asset-based communitydriven development (ABCD) as an approach and model to address the challenges of Africa. In *Community Development Practice in Africa: Putting Theory into Practice* (pp. 67-84).
- Nel, H. (2025). Asset-based community development in South Africa. In *Strengths-Based Practice in Adult Social Work and Social Care* (pp. 133-144).
- Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2024). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. *International*



- Journal of Social Economics*, 51(3), 297-312.
<https://doi.org/10.1108/ijse-10-2022-0700>
- Riska Farisa, B. M., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2019). Social capital and community participation on infrastructure development in Pajaran Village, Malang Regency Indonesia. Paper presented at *the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Satoto, S., Nuriyatman, E., Mushawirya, R., Mujib, M. M., & Haq, M. I. (2024). Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity. *Jambe Law Journal*, 7(2), 509-537.
<https://doi.org/10.22437/home.v7i2.364>
- South, J., Coan, S., Woodward, J., Bagnall, A. M., & Rippon, S. (2024). Asset based community development: Co-designing an asset-based evaluation study for community research. *SAGE Open*, 14(2).
[doi:10.1177/21582440241240836](https://doi.org/10.1177/21582440241240836)
- Syafitri, Y., Prasetyo, A., & Astika, R. (2021). Sistem informasi pemasaran produk UMKM berbasis web pada Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 9(2), 126-134.
- Trinanda, U. L. T. A. R. I., & Khoirunurrofik, K. (2024). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256-280. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206-224.
[doi:10.1093/cdj/bsab046](https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046)
- Widiastuti, A., Saputri, A., Riani, L. P., Mulyani, E., & Samsudin, N. (2025). The Implementation of Social Entrepreneurship Values in Village-Owned Enterprise (BUMDes): Is it favorable. *Jurnal Economia*, 21(1), 157-169.
<https://doi.org/10.21831/economia.v21i1.79634>
- Yulianto, Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2021). Pemetaan potensi desa-PRUKADES dan pendampingan peningkatan kapasitas BUMDes di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*,

2(1), 1-8.
<https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.28476>

